

”Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sumber)”

Oleh:

Ike Elissa Juni Liana, Drs. Zainal Hidayat, MA, Drs. AUFARUL MAROM, M.Si

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>

Email: qiqijatman@gmail.com

Abstract

The most important stage in a process of public policy is policy implementation. One of the government programs to reduce poverty in the villages on the basis of community empowerment is PNPM Mandiri. Activity Management Unit (UPK) is one of the most important component in the success of PNPM Rural destination. But over PNPM Rural in Sub Source, former Secretary of the District of Sumber stumble UPK corruption cases women’s credit funds (SPP). As a result of this case is the amount of arrears by a group of women beneficiaries SPP funds. The purpose of this study is to investigate the implementation of PNPM Rural in District Related resources on UPK District of Sumber and to identify factors driving and inhibiting factors of implementation. The theory used is the implementation of the theory of George Edwards III.

This research is a qualitative descriptive study. Informants in this study is the Chairman of the Supervisory Board UPK District of Sumber, Chairman and Treasurer UPK District of Sumber and Chairman of user groups women’s credit fund. This research data collection techniques are not structured interviews, observation, documentation and triangulation of data

sources. To analyze the data using domain analysis to analyze the general picture of the research object.

The result showed that the implementation of Rural seen in District Sumber of policies considered good accuracy, precision of execution is considered less good, the precision of the target is considered good, the environment is considered good accuracy and precision of the process is considered less good. While driving factor is the implementation of communication and resources. While limiting factor is the implementation of dispotion, beraucratic structures and the level of commitment of the target group.

Keywords: Implementation, PNPM Rural, Activity Management Unit

A. Latar Belakang Masalah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan kebijakan nasional yang mewadahi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara umum PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan dalam rangka mencapai Millennium Development Goals (MDGs).

Menkokesra menindaklanjuti PNPM Mandiri dengan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri

minta Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM. Presiden RI kemudian menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri. Dalam pelaksanaannya, banyak daerah yang menjadi sasaran PNPM-Mandiri baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program untuk pemberdayaan masyarakat kota yang lebih di kenal dengan P2KP, sedangkan untuk masyarakat desa dinamakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Kecamatan Sumber merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang yang tercatat sebagai

kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak. Pada tahun 2011, data dari Kecamatan Sumber menunjukkan 7.281 keluarga atau sebesar 68,07 % keluarga di Kecamatan Sumber termasuk dalam kategori keluarga pra sejahtera, yakni keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal antara lain sandang, pangan, papan, pengajaran, kesehatan dan agama. Seiring dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Kecamatan Sumber merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang menjadi target dari PNPM Mandiri Perdesaan dikarenakan masih banyaknya penduduk miskin di daerah tersebut. Dengan kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam tersebut seyogjanya akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber dibentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan di Kecamatan Sumber terjadi permasalahan yakni adanya dugaan penyelewengan dana SPP oleh mantan Sekretaris UPK Kecamatan Sumber yang dinilai merugikan negara sebesar lebih dari Rp600 juta. Dugaan penyelewengan sendiri terungkap melalui audit investigasi Badan Pengawas UPK PMPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sumber pada November 2011.

Setelah terjadi kasus diatas banyak muncul kelompok-kelompok fiktif yang dibuat sendiri oleh mantan Sekretaris UPK Kecamatan Sumber tersebut yang sudah diproses secara hukum. Dampak dari kelompok-kelompok fiktif tersebut menjadikan perguliran dana SPP di UPK Kecamatan Sumber menjadi banyak kemacetan. Banyak kelompok-kelompok perempuan yang mengalami penunggakan pembayaran.

.Dengan adanya tunggakan pengembalian dana SPP oleh kelompok perempuan berarti perguliran dana SPP dalam UPK Kecamatan Sumber juga tidak lancar. Hal ini akan menimbulkan

dampak bagi kelancaran arus pinjaman dana SPP oleh kelompok-kelompok perempuan di desa lain yang akan mengajukan pinjaman guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu juga adanya perguliran dana yang tidak lancar akan menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terkait pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terkait pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber.

C. Teori

C.1. Implementasi Program

Mempelajari implementasi pada hakekatnya berusaha untuk

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diformulasikan dan mendapat pengesahan. Implementasi khususnya berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2011, 650) sebagai berikut:

Pertama, Ketepatan Kebijakan yang dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua pernyataan ini adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Kedua, Ketepatan pelaksanaan berkaitan dengan aktor implementasi kebijakan, seperti diketahui bahwa aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah melainkan ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah, masyarakat/swasta, atau kebijakan yang diswastakan.

Ketiga, Ketepatan Target yaitu berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang akan diintervensi sesuai dengan yang direncanakan? Apakah tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain? Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi? Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya?

Keempat, Ketepatan lingkungan. Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan yaitu lingkungan kebijakan yang artinya interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Lingkungan yang kedua oleh Calista dalam Riant

Nugroho (2011, 652) disebut variabel eksogen yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan.

Kelima adalah Ketepatan proses, secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses dalam Riant Nugroho (2011, 652), yaitu :

1. *Policy acceptance* artinya publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah *memahami* kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
2. *Policy adoption* artinya publik memahami kebijakan sebagai sebuah ‘aturan main’ yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah *menerima* kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
3. *Policy readiness* artinya publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain

birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Model Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn (1975). Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik antara lain: Standart dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi, politik, Disposisi implementor.
2. Model Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Ada 3 hal yang diperhatikan, antara lain: Karakteristik masalah implementasi kebijakan, Karakteristik kebijakan, Lingkungan kebijakan.
3. Model Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III (1980). Dalam pandangan *Edwards III*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi.

4. Model Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980). Keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh 2 hal, yakni: Isi kebijakan dan Lingkungan Implementasi.

Berkaitan dengan topik penelitian yang diambil yaitu mengenai implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terkait pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber maka di dalam penelitian akan dianalisis hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan antara lain seperti ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Sedangkan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi dianalisis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

C.2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: Bertumpu pada pembangunan manusia, Otonomi, Desentralisasi, Berorientasi pada masyarakat miskin, Partisipasi, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Demokratis, Transparansi dan Akuntabel, Prioritas, Kolaborasi, Keberlanjutan, Sederhana.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber Kabupaten

Rembang dan Desa Sumber Kecamatan Sumber.

Subjek penelitian implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terkait pada UPK Kecamatan Sumber adalah: Ketua Badan Pengawas UPK Kecamatan Sumber, Ketua UPK Kecamatan Sumber, Bendahara UPK Kecamatan Sumber, dan Ketua Kelompok Perempuan “Kelompok Muslimat I” dari Desa Sumber Kecamatan Sumber.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer yang berupa ucapan responden berupa hasil wawancara dengan para responden, catatan lapangan dari observasi, dokumen-dokumen UPK Kecamatan Sumber dan fotografi. Data sekunder yang berupa UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden No. 54 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), referensi buku dan internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara,

observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber data.

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Domain Spradley dalam observasi. Tujuannya yaitu untuk mengkaji secara sistematis tentang sesuatu hal untuk menentukan bagian, relasi di antara bagian, dan hubungannya secara keseluruhan.

E. Gambaran Umum

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten Rembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS.

Batas-batas administratif Kabupaten Rembang adalah Sebelah Utara: Laut Jawa, Sebelah Timur: Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, Sebelah Selatan: Kabupaten Blora, Sebelah Barat: Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar

adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha).

F. Hasil Penelitian

F.1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terkait Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber.

- Didalam ketepatan kebijakan, PNPM Mandiri Perdesaan dikatakan baik karena PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber dapat membantu mengurangi angka kemiskinan masyarakat di Kecamatan Sumber dan adanya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sumber, PNPM Mandiri sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan yakni adanya strategi-strategi dalam mencapai tujuan dan PNPM Mandiri dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya seperti Kementerian Koordinator Kesra, Bappenas, Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri.

- Didalam ketepatan pelaksanaan masing-masing aktor implementasi kebijakan belum semuanya melaksanakan perannya sesuai dengan kewenangan dan tingkat urgenitas mereka masing-masing. Adapun UPK Kecamatan Sumber dinilai tidak melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik dikarenakan adanya kasus korupsi oleh mantan Sekretaris UPK Kecamatan Sumber. Sedangkan LSM Gema Nusa Rembang dan UNDIP Semarang dan STIE YPPI Rembang dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian peran masyarakat di Kecamatan Sumber dinilai kurang baik karena masih banyaknya tunggakan dana SPP yang masih belum dibayar.
- Didalam ketepatan target, implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber terkait pada UPK Kecamatan Sumber dapat dikatakan baik. Para RTM sudah memiliki kesiapan sebelumnya dalam

mendukung PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber tidak tumpang tindih dengan program-program yang lain di Kecamatan Sumber.

- Didalam ketepatan lingkungan, Interaksi antara pembuat kebijakan PNPM Mandiri dengan para pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber dilakukan dengan baik. Ada koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan proses maupun apabila terjadi masalah yang menyangkut PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber. Sedangkan persepsi kelompok perempuan tentang PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber berjalan dengan baik, dan masyarakat meminta para anggota UPK lebih konsekuensi lagi dengan amanah mereka dan mematuhi aturan-aturan di UPK

sehingga tidak ada lagi kasus korupsi.

- Didalam ketepatan proses, bahwa adanya penerimaan dan kesiapan yang baik dari masyarakat mengenai PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi dari sisi pemahaman tentang PNPM Mandiri Perdesaan, masih dikatakan kurang baik dikarenakan banyak kelompok pemanfaat dana SPP yang masih punya tunggakan yang banyak dan belum melunasi tunggakannya. Selain itu dari sisi pemahaman, penerimaan dan kesiapan UPK Kecamatan Sumber dalam PNPM Mandiri Perdesaan dikatakan tidak baik karena seiring proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber, anggota UPK Kecamatan Sumber terlibat kasus korupsi.

F.2. Faktor Pendorong Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber terkait Pada UPK Kecamatan Sumber

a. Komunikasi

Komunikasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber dilakukan dengan baik. Komunikasi yang dibangun oleh UPK Kecamatan Sumber kepada masyarakat di Kecamatan Sumber yakni dilakukan dengan cara mensosialisasikan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan beserta tujuan dari program-program tersebut baik secara individu anggota UPK, maupun secara lembaga seperti pada saat rapat koordinasi (rakor) Kepala Desa, rakor PKK.

b. Sumberdaya

Sumberdaya dalam hal ini ada 2: sumberdaya dan kompetensi implementor. Sumberdaya finansial sudah terpenuhi.

Aset modal UPK Kecamatan Sumber juga sudah mencukupi 265 kelompok perempuan peminjam dana Simpan Pinjam Perempuan. Sedangkan kompetensi implementor para anggota UPK Kecamatan Sumber sudah baik. UPK Kecamatan Sumber juga pernah meraih kejuaraan pada tahun 2010 sebagai UPK terbaik di

Kabupaten Rembang dan memperoleh harapan I UPK terbaik di tingkat Propinsi Jawa Tengah.

F.3. Faktor Penghambat Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber terkait pada UPK Kecamatan Sumber

a. Disposisi

Disposisi yakni komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Disposisi anggota UPK Kecamatan Sumber dapat dikatakan masih tidak optimal terbukti dengan adanya kasus penyelewangan dana Simpan Pinjam Perempuan oleh mantan Sekretaris UPK Kecamatan Sumber dan mantan Sekretaris UPK Kecamatan Sumber ini juga merangkap pekerjaan di instansi lain.

b. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dilihat dari dua aspek, yaitu mekanisme program dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme program yang buruk dibuktikan adanya anggota UPK Kecamatan

Sumber yang tidak melakukan mekanisme kegiatan sesuai dengan SOP yakni dengan melakukan pelanggaran SOP dana SPP. Selain itu juga struktur birokrasi di dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber dikatakan terlalu panjang sehingga melemahkan sistem pengawasan di UPK Kecamatan Sumber.

c. Tingkat komitmen dari kelompok sasaran

Tingkat komitmen dari kelompok sasaran yang buruk dibuktikan dengan adanya masih banyaknya tunggakan dana SPP di UPK Kecamatan Sumber. Selain itu juga administrasi kelompok perempuan peminjam dana SPP di UPK Kecamatan Sumber yang belum tertib.

G. Penutup

G.1. Kesimpulan

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terkait Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Didalam ketepatan kebijakan, PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Kecamatan Sumber dikatakan baik.
- Didalam ketepatan pelaksanaan masing-masing aktor implementasi kebijakan belum semuanya melaksanakan perannya sesuai dengan kewenangan dan tingkat urgenitas mereka masing-masing.
- Didalam ketepatan target, implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber terkait pada UPK Kecamatan Sumber dapat dikatakan baik.
- Didalam ketepatan lingkungan, Interaksi antara pembuat kebijakan PNPM Mandiri dengan para pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber dilakukan dengan baik.
- Didalam ketepatan proses, bahwa adanya penerimaan dan kesiapan yang baik dari masyarakat mengenai PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi dari sisi pemahaman tentang PNPM Mandiri Perdesaan, masih dikatakan kurang baik.

Adapun faktor pendorong implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber terkait pada UPK Kecamatan Sumber yakni komunikasi dan Sumberdaya.

Sedangkan faktor penghambat implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber terkait pada UPK Kecamatan Sumber yakni disposisi, struktur birokrasi dan tingkat komitmen dari kelompok sasaran.

G.2. Saran

1. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Badan Pengawas UPK Kecamatan Sumber diharapkan lebih tegas dalam proses pengawasan program, sehingga kasus korupsi tidak terjadi lagi dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berjalan sesuai dengan prosedur.
2. Perlu kesadaran yang lebih untuk para kelompok perempuan peminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk segera melunasi tunggakan angsuran pinjaman dana SPP agar perguliran dana di UPK Kecamatan Sumber tetap lancar

sehingga program-program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber tetap berjalan sesuai tujuan.

3. Agar seluruh anggota UPK Kecamatan Sumber diharapkan lebih memprioritaskan kepentingan dan kemajuan masyarakat di Kecamatan Sumber dari pada memprioritaskan kepentingan pribadi. Selain itu juga harus lebih berkomitmen atas sumpah janji saat mereka dilantik menjadi anggota UPK Kecamatan Sumber.
4. Memberikan sanksi baik moril maupun materil bagi anggota UPK Kecamatan Sumber yang melanggar *Standart Operating Procedures* di dalam menjalankan mekanisme program.
5. Masyarakat Kecamatan Sumber diharapkan berperan serta dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, karena semua itu akan menentukan keberhasilan

dan kelancaran PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Santoso, Purwo dan Joash Tapiheru. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang

Syakrani dan Syahrhani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Kencana

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Analisis Domain dan Taksonomi (Analisis Spradley). (2011). Dalam <http://tepenr06.wordpress.com/2011/11/08/analisis-domaindataaksonomi-analisspradley/>. Diunduh pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 02.00 WIB

Bab 2 Kajian Pustaka. (2009). Dalam http://eprints.uny.ac.id/9705/2/BAB%202_08110241019.pdf. Diunduh pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 07.00 WIB

Mantan Sekretaris UPK PNPM Sumber Ditahan. (2013). Dalam: <http://mataairradio.net/headline/upk-pnpmditahan#sthash.ce4aMudI.dpuf>. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2014 pukul 09.15 WIB

Pedoman Umum PNPM Mandiri. (2007/2008). Dalam: <http://pedoman-umumpnpm.pdf>. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2014 pukul 09.30 WIB

Status Bermasalah untuk UPK Kecamatan Sumber Dicabut. (2013). Dalam: <http://mataairradio.net/headline/status-bermasalah-untuk-upksumberdicabut#sthash.ES9ruAK6.dpuf>. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2014 pukul 10.00 WIB

Pemerintah Kecamatan Sumber. (2011). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kecamatan Sumber Tahun 2011*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Bupati Rembang. (2011). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012*: Pemerintah Kabupaten Rembang

